

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan sosial tidaklah diciptakan, apalagi diluncurkan atau dipimpin oleh para pemimpin. Setiap kali ada kesempatan atau setiap kali muncul ketidakpuasan manusia yang melewati batas-batas kesabaran manusia, gerakan sosial muncul dengan sendirinya dan terwujud dalam aksi-aksi dari kesadaran kolektivitas yang bersifat konflikual. Gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan kultural mereka (Singh, 2010).

Fenomena gerakan sosial di Indonesia bukanlah menjadi hal yang baru. Jika dilihat dari rekam sejarah bangsa Indonesia, gerakan sosial di Indonesia muncul sejak era kolonialisme. Melalui pemberontakan-pemberontakan dan perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan pada abad 20-an untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Sementara masa setelah kemerdekaan atau pada era orde baru yang terjadi antara tahun 1960-1990-an dalam segala keterbatasan ruang gerakanya berkembang gerakan-gerakan demokrasi, feminisme, hak-hak asasi manusia dan gerakan lingkungan. Ragam gerakan tersebut terus berlanjut dan semakin menguat terutama akhir tahun 1990-an hingga berhasil menciptakan gerakan revolusi bangsa yang disebut dengan

reformasi yang ditandai dengan berakhirnya era orde baru tahun 1998. Sampai saat ini kita menyaksikan banyak terjadi gerakan perlawanan masyarakat dalam upaya menentang atau mendorong terjadinya perubahan sosial maupun kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama pada kebijakan pertambangan.

Menurut Undang-Undang Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang¹. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya bumi dan air yang bisa disebut dengan bahan-bahan galian, dimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya yang sangat melimpah sehingga pertambangan merupakan salah satu usaha industri yang dapat diandalkan untuk mendatangkan devisa negara bagi Indonesia. Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber

daya alam yang berlimpah. Salah satu aset yang menonjol di Kabupaten Pinrang adalah tambang pasir (Galian C) karena Kabupaten Pinrang termasuk salah satu daerah yang dialiri oleh sungai terpanjang dan terbesar di Sulawesi Selatan yaitu Sungai Saddang.

Pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, ada beberapa kasus pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin ataupun memiliki izin tapi tidak sesuai format perizinan, artinya lokasi yang menjadi pertambangan tidak di kaji lebih dalam termasuk dari segi ekologi dan kemasyarakatan, sehingga pertambangan sering menimbulkan konflik, baik dengan masyarakat dengan pengusaha tambang (pemegang izin) maupun antara masyarakat dengan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam hal tambang. Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Pinrang beberapa wilayah dijadikan sebagai wilayah pertambangan oleh Pemerintah Daerah, seperti Desa Bababinanga, Kecamatan Duampuanua dan Desa Salipolo, Kecamatan Cempa.

Usaha pertambangan harus menyeimbangkan kelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup. Artinya pembangunan yang dilakukan tidak hanya menomorsatukan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi juga diiringi dengan pengelolaan lingkungan. Hal ini merujuk pada pembangunan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 4 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan Hidup wajib memiliki; a) Amdal; b) UKL-UPL atau; c) SPPL. Dimana dalam proses tersebut melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kepemilikan izin dalam bidang usaha merupakan upaya untuk membatasi hak-hak dan kewajiban para pemilik usaha. Serta sebagai cara untuk melindungi dan mengendalikan dampak lingkungan dari pemanfaatan sumber daya yang diambil dari alam. Oleh karena itu, setiap pendirian dan pengelolaan usaha harus memiliki izin dan bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan.

Menurut Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, kegiatan tambang yang dilakukan penambang pasir di bantaran Sungai Saddang tidak sesuai dengan lokasi peruntukannya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Kecamatan Cempa, Desa Salipolo bukan wilayah peruntukan tambang. Wilayah konsesi tambang seluas 182 hektar di Desa Salipolo. Dari luasan lokasi tambang dan ketidaksesuaian ruang yang membuat masyarakat menolak aktivitas pertambangan di Desa Salipolo.

penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salopolo dan Desa Bababinanga bukan tanpa alasan yang jelas. Setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut yaitu dampak dari aktivitas tambang yang bisa merugikan masyarakat dari segi ekonomi dan lingkungan. Alasan kedua berkenaan dengan warga yang tidak diberi hak

serta tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak bagi lingkungan.

Pertambangan Galian C yang ada di Desa Salipolo Kecamatan Cempa dan Desa Bababinanga Kecamatan Duampanua memicu kemarahan masyarakat. Masyarakat menilai aktivitas pertambangan di Daerah Aliran Sungai Saddang dapat memicu kerusakan lingkungan parah yang mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat khawatir pertambangan akan berdampak pada terjadinya banjir, abrasi, dan longsor yang dapat menenggelamkan kampung seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan di tahun 2010 yang menyebabkan peristiwa besar yang menyebabkan tanah-tanah masyarakat seperti, tambak, kebun, pemukiman, fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum) hilang akibat arus sungai yang meluap.

Pada tahun 1995,¹ pemerintah sempat melakukan penggalian di Daerah Aliran Sungai Saddang, tepatnya di anak sungai yang mengalir ke muara sungai dengan jalur utama sungai menuju ke Desa Paria Kecamatan Duampanua. Penggalian sedalam tiga meter tersebut dilakukan untuk pembangunan pintu air agar dapat dimanfaatkan untuk mengairi tambak-tambak masyarakat. Akan tetapi akibat penggalian tersebut justru menyebabkan bencana saat musim hujan tiba. Aliran sungai yang deras

¹ Idham Malik, "Ada Apa dengan Sungai Saddang di Bababinanga dan Paria Pinrang?", *MataKita*, 18 Oktober 2023, <https://matakita.co/2021/08/28/ada-apa-dengan-sungai-saddang-di-bababinanga-dan-paria-pinrang/>

menyebabkan volume air sungai yang mengalir ke anak sungai justru meningkat dan menghancurkan tambak-tambak dan juga pemukiman milik masyarakat akibat abrasi, serta menghancurkan jembatan penghubung antara Dusun Cilallang dan Dusun Babana, Desa bababinanga.

Kemudian di tahun 2010 terjadi bencana banjir besar yang menenggelamkan pemukiman, tambak, kebun, dan sekolah di Dusun Cilallang.² Sekitar 2015 Kepala Keluarga (KK) kemudian direlokasi ke Desa Salipolo.³ Atas kejadian traumatik tersebut, warga tidak ingin kejadian serupa bahkan peristiwa yang lebih besar akan kembali terjadi. Sehingga penolakan terhadap kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Saddang menjadi keharusan. Apalagi aktifitas tambang ini tidak pernah melibatkan dan meminta persetujuan warga yang berada di lokasi penambangan maupun lokasi-lokasi yang akan terdampak tambang.

Penolakan aktifitas tambang dimulai sejak tahun 2017 di desa Bababinanga Kecamatan Duampanua. Penolakan di desa Bababinangan menyebabkan delapan warga diberikan surat panggilan oleh pihak kepolisian. Setelah ditolak, akhirnya pindah ke desa Paria namun ditolak kembali dan kembali pindah ke desa Kaliang kemudian ditolak lagi.

Tahun 2019 akhirnya beraktivitas di Desa Salipolo. Luas wilayah yang menjadi lokasi tambang seluas 182 hektar di Desa Salipolo. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang,

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Kecamatan Cempa tidak termasuk kawasan yang diperuntukkan sebagai Zona Tambang. Dari luasan lokasi tambang dan ketidaksesuaian ruang, dapat dipastikan bahwa kerusakan lingkungan dan penghilangan wilayah kelola rakyat akan semakin massif.

Menanggapi permasalahan tersebut, terbentuklah Aliansi Perjuangan Rakyat Salipolo dari beberapa Organisasi Sipil, Organisasi Kemahasiswaan dan Masyarakat Desa Salipolo yang mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk memperjuangkan Hak atas Lingkungan yang baik dan melawan segala bentuk perampasan ruangan yang semakin masif.

Dari uraian diatas, terlihat keberadaan aktivitas pertambangan illegal telah menimbulkan konflik masyarakat yang tidak puas dan yang merasa dirugikan kemudian melakukan gerakan penolakan. Dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian terkait gerakan sosial penolakan keberadaan aktivitas pertambangan illegal yang terjadi di Desa Salipolo.

1.2 Masalah Penelitian

Adapun masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi gerakan penolakan masyarakat di Desa Salipolo terhadap pertambangan galian C di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana dampak gerakan penolakan masyarakat Desa Salipolo terhadap pertambangan galian C di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian gerakan perlawanan masyarakat terhadap keberadaan penambangan pasir di Desa Salipolo memiliki tujuan yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab terjadinya gerakan penolakan masyarakat terhadap pertambangan di Desa Salipolo.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari gerakan penolakan masyarakat terhadap pertambangan di Desa Salipolo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Untuk memberikan kontribusi bagi studi ilmu politik khususnya tentang gerakan sosial masyarakat.
2. Sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan akademis bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak yang ingin mengetahui tentang gerakan penolakan masyarakat tambang dalam konflik aktivitas pertambangan di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.
2. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan Pemerintah Daerah terkait dalam penyelesaian polemik yang terjadi pada aktivitas pertambangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas uraian teori dan konsep yang dijadikan landasan penelitian. Teori terkait ialah Gerakan Sosial dan Politik Lingkungan. Pada bab ini juga penulis membahas penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dan juga membahas kerangka pemikiran.

2.1 Gerakan Sosial

Fenomena gerakan sosial bukanlah hal yang aneh dan baru di dalam masyarakat Indonesia, karena merupakan bagian terpenting dalam perjalanan panjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan atau menginginkan perubahan sosial karena dinilai tidak adil.⁴

Hampir selalu terjadi, gerakan sosial dalam segala bentuk diawali oleh ketidakpuasan. Bentuk ketidakpuasan itu bisa terhadap norma-norma yang sedang berlaku, struktur sosial yang tidak adil, sistem politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, diskriminasi kelompok dan identitas tertentu dan keseluruhannya bisa pula dilihat dari kaca mata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda. ketidakpuasan sendiri bukan merupakan alasan yang cukup bagi gerakan sosial untuk berkembang atau bagi

⁴ Andrianthy, N.2009.*Gerakan sosial: Aktivisme Gemkara-BP3KB dan pengaruhnya dalam mewujudkan Kabupaten Batubara*, Medan: Sumatera Utara University Press, Hal: 12

individu untuk berpartisipasi di dalam gerakan sosial. Sumber daya dan peluang penting untuk memahami mengapa populasi tertentu yang mengalami ketidakpuasan melakukan mobilisasi, sementara yang lain tidak. Individu-individu memang membentuk identitas yang sama ketika mereka bersama-sama berbagi ketidakpuasan dan bertindak secara kolektif.

Gerakan sosial menurut Robert Miesel, didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang terlembagakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat. Kemunculan gerakan sosial tidak bisa dilepas dari perkumpulan massal (*mass society*) dan tingkah laku kolektif (*collective behavior*). Elemen kunci dari setiap gerakan sosial menurutnya adalah organisasi-organisasi gerakan, bukan individu-individu, organisasi-organisasi tersebut merupakan unit-unit penggerak dari sebuah penelitian.⁵

Kemudian Robert Miesel menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial : (1) gerakan sosial dimengerti dalam hubungannya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. (2) Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. (3) Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah mobilisasi berbagai macam konstituen dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibuthkan, (4) Bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan

⁵ Robert Miesel, *Teori Pergerakan Sosial*. (Yogyakarta : Reist Book, 2004).

yang terlembagakan dan (5) Fenomena perilaku kolektif (demonstrasi) sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah gerakan.⁶

Menurut Rajendra Singh,⁷ gerakan sosial ialah : (1) Mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan, keadilan sosial, mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan budaya mereka. Aksi-aksi kolektif merupakan kenyataan yang esensial dan senantiasa ada dalam gerakan sosial, aksi kolektif menurutnya sebagai usaha bersama dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, meskipun berhadapan dengan penentangan dan konflik. (2) Memobilisasi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha menyuarkan keluhan melawan pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat. Gerakan sosial juga menurutnya harus dicirikan oleh adanya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh anggotanya.

Menurut Anthony Giddens yang dikutip oleh Suharko,⁸ gerakan sosial ialah upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Definisi senada juga dirumuskan oleh

⁶ *Ibid* Hal 56-58.

⁷ Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru*. (Yogyakarta : Resit Book, 2010).

⁸ Suharko, *Gerakan Sosial Baru di Indonesia* dalam *Jurnal Sosial dan Ilmu Politik* Vol 10, Nomor 1 Juli 2006.

Sydney Tarrow,⁹ bahwa gerakan sosial merupakan tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama serta solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan para elit pemegang kewenangan. Menurut Tarrow, tindakan yang mendasari politik perlawanan adalah aksi kolektif yang melawan. Tindakan perlawanan ini bisa mengambil banyak bentuk dari yang singkat maupun berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar. Tetapi menurutnya tindakan kolektif umumnya berlangsung dalam suatu institusi ketika orang-orang yang bergabung di dalamnya sama-sama bertindak untuk mencapai tujuan bersama. Gerakan sosial memiliki nuansa penentangan dan perlawanan ketika aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki akses ke institusi-institusi pembuat kebijakan, apalagi ketika orang-orang yang terlibat gerakan sosial mengajukan klaim baru, kemudian klaim tersebut tidak dapat diterima oleh para pemegang otoritas. Selain itu menurut Tarrow, aksi kolektif yang melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi itu seringkali merupakan satu-satunya sumberdaya yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat gerakan sosial dalam menentang pihak-pihak lain yang lebih kuat, seperti misalnya negara.

Sedangkan Mansour Fakih dalam studinya tentang gerakan sosial, ia mengutip beberapa definisi tentang gerakan sosial¹⁰ : (1) Gerakan sosial padasarnya merupakan bentuk perilaku politik kolektif non kelembagaan

⁹ *Jurnal Penelitian Bogor Agricultural University* www.repository.ipd.ac.id.

¹⁰ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformatif Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) Hal 41.

yang secara potensial bisa mengancam stabilitas cara hidup yang mapan, (2) Gerakan sosial merupakan bagian dari generasi baru yang memperjuangkan pengakuan dan perlunya melakukan penentangan terhadap orangtua mereka dan “kemapanan” yang tidak memberikan pengakuan semacam itu kepada mereka. (3) gerakan sosial mewakili generasi baru dengan kebutuhan lebih tinggi, tepatnya karena mereka muncul kesenangan sebagai kelas menengah, beradda dalam posisi mencari nilai-nilai pasca materi, berkaitan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan diri sendiri serta tujuan yang lebih *alturistik* berhubungan dengan kualitas hidupnya dan (4) Gerakan sosial sebagai gerakan kelas menengah yang teralineasi.

Sedangkan Blumer,¹¹ menjelaskan bahwa gerakan sosial melibatkan cara-cara yang tidak terlembagakan, seperti pawai, demonstrasi, protes untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan sosial melibatkan jumlah orang yang cukup banyak dan biasanya berlanjut untuk rentang waktu yang cukup panjang. Jadi gerakan sosial merupakan transformasi kesadaran, tentang eksistensi manusia untuk melakukan perubahan, atau bentuk-bentuk perilaku kolektif non kelembagaan yang secara potensial berbahaya, karena selalu mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Gerakan sosial secara lebih filosofis sebagai suatu gerakan yang dicirikan oleh bangkitnya kerelaan pada para anggotanya

¹¹ Blumer, Herbert G., *Social Movements*, dalam R. Serge Denisoff (ed). 1974. *The Sociology of Dissent*. New York : Harcourt. Brace, Jovanovich, sebagaimana dikutip dalam John E. Farley. 1992. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall, hlm. 586.

untuk berkorban sampai mati, berkecenderungan untuk beraksi secara kompak, memiliki fanatisme kelompok dan harapan berapi-api.

2.1.1 Akar Gerakan Sosial

Ada sejumlah teori yang mencoba menunjukkan akar dari gerakan sosial. *Pertama*, Teori Deprivasi Relatif (*Relative Deprivation Theory*). Menurut konsep deprivasi relatif, seorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gerakan sosial muncul ketika orang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan selayaknya, relatif dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang lain atau bagaimana mereka merasa seharusnya diperlakukan. *Kedua*, Teori Mobilisasi Sumberdaya (*Resource Mobilization Theory*). Teori ini berargumen bahwa gerakan sosial muncul ketika orang memiliki akses pada sumberdaya, yang memungkinkan mereka menorganisasikan suatu gerakan. Menurut asumsi teori ini, sejumlah ketidakpuasan selalu ada dalam masyarakat, namun sumberdaya yang dibutuhkan untuk membentuk gerakan – gerakan sosial tidak selalu tersedia. *Ketiga*, Teori Proses-Politik. Teori ini erat kaitannya dengan Teori Mobilisasi Sumberdaya. Pendekatan teori proses-politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan, yang diciptakan proses oleh proses politik dan sosial yang lebih besar. Tidak adanya represi yang diasosiasikan dengan masyarakat-masyarakat demokratis, industrialisasi, dan urbanisasi, dan adanya lingkungan politik yang memadai, misalnya memudahkan bagi munculnya gerakan-gerakan sosial, ketika orang

menyadari bahwa sistem itu rawan terhadap protes, gerakan - gerakan sosial tampaknya terdorong untuk muncul.¹²

2.1.2 Aktor Gerakan Sosial

Menurut Aswab Mahasin,¹³ dengan mengutip Eric Wolf, Barrington Moore dan Landsberger, menjelaskan bahwa gerakan sosial lebih banyak diprakarsai oleh golongan menengah, lebih jauh ia mengatakan gerakan sosial yang digerakan oleh masa kelas bawah hanya sebagai mitos. Golongan menengah bisa berupa kelompok studi, perkumpulan mahasiswa, kelompok kohesif, komunitas pedagang dan kaum buruh perkotaan. Kelompok-kelompok menengah tersebut mencoba menjaring konstituen dengan menghimpun para pengikut sebanyak mungkin, karena sebuah gerakan sangat ditentukan oleh basis massa yang ikut terlibat. Ernest Gellner,¹⁴ sangat ditentukan tingkat kesadaran dan rasionalitas massa yang bersangkutan, dalam bahasa Gellner, komunitas massa yang berkesadaran. Kecenderungan sebuah gerakan yang dapat melibatkan massa dengan jumlah yang besar adalah adanya faktor pemersatu yang dapat dijadikan sebagai solidaritas bersama. Faktor pemersatu itu bisa berupa ideologi, isu-isu atau tema-tema tertentu seperti keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia, tentunya ideologi dan tema yang diangkat mampu menafsirkan berbagai persoalan-persoalan yang muncul dan dihadapi secara objektif.

¹² Suharko. *Ibid.*

¹³ Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, *Cendekiawan dan Politik*. (Jakarta : LP3ES, 1983)

¹⁴ Ernest Gellner, *Membenagun Masyarakat Sipil : Prasyarat Menuju Kebebasan*. (Bandung : Mizan, 1995).

Para anggota (aktor) kelompok gerakan sosial diidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak puas dan kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam kehidupan kelompok marginal ditengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat, jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial akan senantiasa melibatkan individu atau sekelompok orang yang terorganisir secara baik dan rapih, untuk melakukan sebuah perubahan yang menyentuh dimensi moral, sosial, politik maupun ekonomi.¹⁵

2.1.3 Jenis – Jenis Gerakan Sosial

Menurut Suharko jenis-jenis gerakan sosial diantaranya : (1) gerakan protes, gerakan yang bertujuan untuk mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial yang ada di sebagian besar negara industri. (2) Gerakan Regresif, gerakan yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. (3) Gerakan Religius, gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib (*supernatural*), yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang dominan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*. (Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2008)

¹⁶ Suharko. *Ibid*.

Dalam studinya David F Aberle seperti yang dikutip oleh Damsar,¹⁷ menjelaskan ada empat tipe atau jenis gerakan sosial, yaitu: (1) gerakan sosial alternatif (*alternative social movement*) gerakan yang bertujuan mengubah perilaku tertentu dalam diri individu. Dalam tipe ini mencakup berbagai kegiatan seperti kampanye narkoba, anti sek bebas dan sebagainya. (2) Gerakan sosial redemptif (*redemptive social movement*), gerakan yang bertujuan untuk mengubah keseluruhan perilaku individu, gerakan ini memiliki sasaran yang sama dengan gerakan sosial alternatif, namun berbeda dalam cakupan. Gerakan sosial redemptif merubah perilaku lama menjadi perilaku baru yang berbeda sama sekali dengan yang lama. Contohnya gerakan yang diajukan biasanya tentang gerakan keagamaan seperti gerakan fundamentalis keagamaan. (3) Gerakan sosial reformatif (*reformative social movement*), gerakan perubahan atau reformasi pada segi atau bagian tertentu dari masyarakat. Gerakan sosial ini jelas berbeda gerakan sosial ini jelas berbeda dengan dua gerakan yang disebut lebih awal yang menkankan pada individu. (4) Gerakan sosial transformatif (*transformatif social movement*), gerakan untuk mentransformasikan tatanan sosial itu sendiri, para anggotanya memiliki kehendak mengubah tatanan sosial itu sendiri, para anggotanya memiliki kehendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan yang lebih baik menurut versi mereka.

¹⁷ Damsar, *Pengantar Sosilogi Politik (edisi revisi)* (Jakarta : Kencana, 2010) hal 133-135.

Sedangkan Paul B. Harton dan Chester L. Hunt menjelaskan ada lima jenis bentuk dari gerakan sosial diantaranya : (1) Gerakan perpindahan (*migratory movement*), yaitu arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang baru. (2) Gerakan utopia (*utopian movement*), sebuah gerakan untuk menciptakan suatu masyarakat sejahtera dalam skala terbatas. (3) Gerakan reformasi (*reform movement*), gerakan yang berusaha untuk memperbaiki beberapa kepingangan dalam masyarakat. (4) Gerakan revolusioner (*revolutionary movement*), gerakan yang dibangun untuk menggantikan sistem yang ada dengan sistem yang baru. Para penganut gerakan ini cenderung berebrangan dengan penganut gerakan reformasi, mereka berpendapat perubahan radikal dan mendasar hanya dapat dilaksanakan apabila sistem sosial tersebut diganti dengan yang baru serta kelompok elit yang ada disingkirkan serta diputus mata rantai sirkulasinya. (6) Gerakan perlawanan (*resistance meovement*), gerakan yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi suatu perubahan sosial tertentu.¹⁸

¹⁸ *Ibid Hal 136*

2.1.4 Cara Gerakan Sosial

Berbagai gerakan sosial memiliki beragam cara untuk merealisasikan tujuan yang dimilikinya, berikut ini akan dijelaskan beberapa cara yang dapat digunakan oleh anggota-anggota gerakan sosial :

2.5.1 Kekerasan, meliputi demonstrasi anarkis, pembajakan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan, teror fisik, psikis dan budaya serta perang.

2.5.2 Non-kekerasan, meliputi mogok, demonstrasi damai, pemberdayaan, advokasi dan sebagainya.¹⁹

2.1.5 Ideologi dan Tema Isu Gerakan Sosial

Kecenderungan sebuah gerakan sosial yang dapat melibatkan massa dalam jumlah besar adalah adanya faktor pemersatu yang dapat dijadikan solidaritas bersama. Faktor pemersatu ini bisa berupa ideologi, isu-isu atau tema-tema tertentu yang muncul dimasyarakat.

Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari atas dua kata, yakni *ideo* artinya pemikiran : *logis* artinya logika, ilmu pengetahuan. Jadi dapat di definisikan ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita.²⁰

Ideologi menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang tepat di berbagai subjek atau

¹⁹ *ibid* Hal 136.

²⁰ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Fisafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010)

keompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, seperti partai politik atau asosiasi politik.²¹ Ciri suatu ideologi adalah cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, bahkan diyakini bersifat universal. Ideologi dirasakan menjadi milik yang mengikat suatu kelompok manusia dalam membenarkan atau mempertahankan perbuatan kelompoknya.

Menurut Bagus Takwin,²² dalam konteks gerakan sosial, ideologi seringkali digunakan sebagai dasar sebagai usaha pembebasan manusia, dalam hal ini ideologi memiliki pengertian sebagai sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam bertingkah laku mencapai tujuan tertentu. Dengan cara menurunkan gagasan-gagasan ideologi menjadidi sejumlah kerangka aksi dan aturan-aturan tindakan, sekelompok manusia bertindak membebaskan diri dari sesuatu yang dipersepsikan sebagai kekangan atau penindasan. Ideologi memberi arah gerakan pembebasan, serta menjadi keyakinan bagi kelompok tersebut.

Dalam studinya tentang gerakan sosial, ilmuwan India, Rajendra Singh,²³ menggolongkan isu-isu atau tema-tema gerakan sosial yang sangat variatif bentuknya, ia menyebut tema-tema gerakan sosial diantaranya adalah (1) Gerakan-gerakan Petani, (2) Gerakan Suku, (3) Gerakan Lingkungan, (4) Gerakan Feminisme.

²¹ *Ibid* Hal 238

²² Bagus Takwin, *Akar-akar Ideologi*. (Yogyakarta : Jalasutra, 2009) Hal 5.

²³ Rajendra Singh, *Ibid* Hal 313

Tema gerakan petani menurut Rajendra Singh,²⁴ merupakan sebuah gerakan yang mengangkat isu-isu tentang kegagalan-kegagalan kebijakan *land reform* yang dilakukan oleh negara dan munculnya dominasi tanah yang dikuasai oleh kelas sosial tertentu di dalam masyarakat yang jumlahnya minoritas. Selain itu gerakan-gerakan petani melukiskan struktur dominasi dan resistensi, struktur kekuasaan dan kontrol atas tanah, pola distribusi lahan yang tidak merata dan sebagai konsekuensi ketimpangan tersebut memunculkan penindasan yang dilakukan beberapa orang yang memonopoli tanah serta sumber daya terhadap mereka yang tidak memiliki hak atas tanah namun kehidupannya bergantung kepadanya. Gerakan petani mengidentikan orang dengan institusi yang bertanggungjawab atas penderitaan yang mereka alami, gerakan sosial yang dibangun oleh petani menunjukkan adanya kontradiksi-kontradiksi struktural dalam sistem relasi tanah.

Sedangkan tema gerakan kesukuan merupakan bentuk-bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh suku-suku tertentu dalam memperjuangkan otonomi dan kebebasan budayanya. Rajendra Singh menjelaskan bahwa gerakan kesukuan melakukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut : (1) menuntut serta mengklaim kepada pemerintah untuk diberikan porsi dalam kekuasaan negara, (2) menuntut memasuki lapangan pekerjaan di semua dinas pemerintahan seperti tentara, polisi dan pemerintahan sipil, (3) menuntut memasuki institusi-institusi perguruan

²⁴ *Ibid* 315-318.

tinggi.²⁵ Sedangkan bentuk gerakan kesukuan menurut Rajendra Singh,²⁶ gerakan sosial ini melakukan eksploitasi simbol-simbol budaya seperti mensimbolkan mereka yang melakukan penindasan sebagai “orang luar” yang berbeda dengan identik masyarakat lokal yang disebut “orang asli” atau mengartikulasi “kita” dengan “mereka” tentunya simbolisasi ini mendatangkan konsekuensinya bagi relasi budaya antara pihak yang dianggap sebagai penindas dengan pihak yang ditindas.

Gerakan lingkungan melakukan aktifitas kolektif dengan mengangkat isu-isu mempertanyakan persoalan-persoalan modernitas dengan menyediakan model perubahan pembangunan alternatif yang ramah lingkungan, pesan inti mereka menurut Rajendra Singh ialah “kembali ke alam”. Seruan mereka untuk kembali ke alam merupakan sebuah rekasi intelektual terhadap pengalaman industrialisasi dan perkembangan kapitalisme yang mereka anggap merugikan lingkungan. Gerakan lingkungan atau yang sering disebut gerakan hijau ini memiliki ideologi yang memberikan keutamaan terhadap aspek-aspek : (1) penekanan akan sikap mengandalkan diri sendiri dan penolakan terhadap ketergantungan yang melahirkan struktur modernitas, pasar, birokrasi dan industrialisasi, (2) otonomi dan identitas sebagai unit pembangunan alternatif yang harus ditentukan secara kultural, (3) Sumber daya sosial harus dimobilisasi demi kepentingan masyarakat komunitas yang paling membutuhkan, (4)

²⁵ *Ibid* Hal 343

²⁶ *Ibid* Hal 347

Terpeliharanya keseimbangan ekologis, sumber daya biosfer dan ekosistem harus dimanfaatkan dengan sebuah kesadaran akan potensi mereka untuk digunakan bagi generasi-generasi di masa depan.²⁷ Gerakan lingkungan telah membalik jalannya modernitas mewujudkan perannya sebagai agen kreatif melakukan pembelaan terhadap alam dan makhluk hidup dalam kondisi-kondisi kehidupan mereka.

Sedangkan gerakan feminis mengangkat tema tentang perbedaan gender, yaitu konsep melekat pada masyarakat tentang relasi antara laki-laki dan perempuan berdasar konstruk sosial maupun budaya, dimana dalam relasi tersebut senantiasa menempatkan perempuan dibawah superioritas laki-laki. Gerakan sosial ini menganggap perbedaan dan pembagian gender antar laki-laki dan perempuan mengakibatkan : (1) proses menganalisis perempuan dalam bidang budaya, birokrasi dan pembangunan. (2) melahirkan kekerasan dan penyiksaan terhadap kaum perempuan, baik secara fisik dan mental, (3) Mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan. Tujuan gerakan feminis ialah mentransformasikan sistem dan struktur tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi kaum laki-laki dan perempuan.²⁸

Selain empat tema yang isu yang diangkat gerakan sosial diatas, menurut Mansour Fakhri,²⁹ terdapat juga gerakan sosial yang mengangkat isu-isu politik khususnya di beberapa negara dunia ketiga, gerakan sosial

²⁷ *Ibid* Hal 73-75.

²⁸ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

²⁹ Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial : Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* Hal 1-45.

tersebut umumnya digerakan oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Gerakan sosial yang mengagendakan isu perubahan politik dilandasi sikap pemerintah yang mengeluarkan beberapa kebijakan yang dinilai tidak demokratis, transparan dan melanggar hak-hak masyarakat sipil. Hakikat dari gerakan sosial yang digerakan oleh mahasiswa pada umumnya adalah gerakan perubahan politik, mereka akan tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan, maka dalam situasi seperti ini, gerakan sosial politik dapat digolongkan sebagai *pressure groups*, karena para pelaku gerakan umumnya beradda diluar struktur dan lembaga resmi, dari luar sistem tersebut mereka melakukan desakan supaya aspirasi dan perjuangan mereka dipenuhi lewat kebijakan yang dihasilkan melalui lembaga-lembaga resmi negara.³⁰

2.1.6 Tahapan – tahapan Gerakan Sosial

Menurut Farley,³¹ gerakan sosial terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya tahap organisasi, birokratisasi atau institusionalisasi, dan akhirnya gerakan sosial cepat atau lambat akan mencapai periode surut (*decline*).

Pertama, tahap organisasi. Selama tahap organisasi, penekanan suatu gerakan sosial adalah pada mobilisasi orang, merekrut peserta baru, dan mencari perhatian media massa. Pada tahap ini aksi demonstrasi,

³⁰ Arbi Sanit, *Politik Mahasiswa Di Antara Ideologi dan Institusionalisasi Politik atau Kekuasaan* Kata Pengantar dalam Philip G. Atabch (editor), *Politik dan Mahasiswa : Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*. (Jakarta : PT. Gramedia, 1988) hal xiii.

³¹ John Farley, *Sociology*.

mendatangi DPR, boikot, dan sebagainya merupakan hal umum. Seringkali juga dilakukan upaya membangun koalisi dengan kelompok-kelompok lain terkait atau yang memiliki tujuan serupa. Membangun organisasi yang layak sangat krusial pada tahapan ini.³²

Kedua, institusionalisasi. Ketika mencapai tahap ini, gerakan sosial telah melewati batas, dari posisinya sebagai “sesuatu yang diluar keadilan” menjadi bagian yang diterima oleh pola politik, religius atau budaya masyarakat. Kantor dan struktur birokratik diciptakan untuk menuntaskan tugas-tugas gerakan. Jika tujuan-tujuan gerakan secara meluas diterima dalam masyarakat, gerakan itu menjadi bagian yang biasa dari struktur sosial yang pada awalnya ia tentang dan mengambil beberapa karakteristik dari struktur tersebut.³³

Ketiga, tahap surut. Pada akhirnya sebuah gerakan mungkin mengalami kemerosotan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan : hilangnya seorang pemimpin kharismatis, pertentangan internal, merosotnya dukungan, atau mungkin karena gerakan itu sudah mencapai sasaran dan tujuan, dan tidak berhasil mengembangkan tujuan-tujuan baru. Meskipun kemerosotan disini disebutkan paling akhir, kemerosotan ini bisa terjadi di titik manapun dalam perkembangan sebuah gerakan sosial. Kecuali jika tahap ini bisa diatasi, tahap surut ini biasanya menandai berakhirnya sebuah gerakan sosial. Dalam sejumlah kasus, tahap surut ini bisa berbalik

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

jadi kebangkitan lagi, ketika kondisi-kondisi sosial menjadi kondusif bagi babak baru aktivitas gerakan.³⁴

Sedangkan menurut Hortono dan Hunt,³⁵ gerakan sosial terbentuk melalui serangkaian proses, ada beberapa tahap terbentuknya gerakan sosial ini. Tahap-tahap tersebut, yaitu *pertama*, tahap ketidaktentraman karena ketidakpastian dan ketidakpuasan yang semakin meningkat. *Kedua*, tahap perangsangan, sebuah tahap yang terjadi ketika perasaan ketidakpuasan sudah sedemikian besar, penyebab-penyebabnya sudah teridentifikasi dan sarana-sarana tindak lanjut diperdebatkan. *Ketiga*, tahap formalisasi, sebuah tahap ketika sosok pemimpin telah muncul, rencana telah disusun, para pendukung telah ditempa dan organisasi serta taktik telah dimatangkan. *Keempat*, tahap institusinalisasi atau tahap pelembagaan, ketika organisasi telah diambil alih dari pemimpin terdahulu, birokrasi telah diperkuat dan ideologi serta program telah diwujudkan. Tahap ini seringkali merupakan akhir dari gerakan sosial. *Kelima*, tahap pembubaran, tahap ketika gerakan sosial berubah menjadi organisasi tetap berjalan atau justru kemunduran, bahkan pembubaran.

Sementara Henslin,³⁶ ada lima tahap perkembangan gerakan sosial kelima tahap tersebut adalah : *pertama*, tahap agitasi awal, tahap ini terjadi ketika orang merasa terganggu oleh kondisi tertentu dan hendak merubahnya. Pada tahap ini muncul sosok pemimpin yang mampu

³⁴ *Ibid*

³⁵ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2011) Hal 227

³⁶ *Ibid* Hal 277-278

menerjemahkan perasaan orang-orang ke dalam bentuk wacana dan menyelesaikan isu-isu. *Kedua*, tahap mobilisasi sumber daya, tahap ini merupakan faktor penentu yang memungkinkan gerakan sosial melewati tahap pertama, sumber daya yang dimaksud disini adalah sumber daya waktu, uang, keterampilan, dan kemampuan menarik perhatian media. *Ketiga*, organisasi. Pada tahap ini gerakan sosial sudah melakukan pembagian kerja, pimpinan gerakan sudah memutuskan kebijakan dan jajarannya melaksanakan tugas sehari-hari yang diperlukan agar gerakan sosial tetap berjalan, pada tahap ini masih banyak dijumpai adanya gerakan kegairahan kolektif terhadap isu yang menjadi pusat keprihatinan gerakan sosial. *Keempat*, institusionalisasi, pada tahap ini gerakan sosial sudah mengembangkan suatu birokrasi, tipe hierarki formal. *Kelima*, kemunduran organisasi dan kemungkinan kebangkitan kembali, gerakan sosial pada tahap ini berpeluang untuk menghilang atau bangkit kembali.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai Gerakan Sosial penolakan masyarakat Desa Salipolo terhadap pertambangan di Sungai Saddang Kabupaten Pinrang. Penelitian tersebut dijadikan referensi dan pembanding dalam proses penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan disini adalah penelitian yang terkait dengan gerakan sosial pertambangan. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan yaitu:

2.8.1 Penelitian ini dilakukan oleh Abimanyu dan Ahsan Nurhadi (2022) dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Percegahan Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batuan di Sungai Gendol (Studi Kasus Gerakan sosial Paguyunam Sindu Tolak Asat)”. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Paguyuban Sindu Tolak Asa (PSTA) merupakan sebuah gerakan sosial masyarakat Sindumartani yang terbentuk karena respon penolakan rencana aktivitas pertambangan oleh CV Kayon di Sungai Gendol, Sindumartani. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan UUPPLH, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbagai macam upaya telah dilakukan PSTA untuk menolak rencana pertambangan di Sungai Gendol, yaitu penyampaian aspirasi publik, memperkuat dukungan dari seluruh masyarakat Sindumartani, serta mengajukan keberatan kepada instansi pemerintah.

Dalam perkembangannya, bentuk kegiatan Paguyuban Sindu Tolak Asat tidak hanya berfokus pada penolakan terhadap rencana aktivitas pertambangan, namun juga memiliki tujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan Sungai Gendol. Bentuk kegiatan telah dilakukan Paguyuban Sindu Tolak Asat ialah program penanaman pohon di sepanjang Sungai Gendol serta pengembangan potensi ekonomi berbasis masyarakat di Sungai Gendol. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sindu Tolak Asat merupakan bentuk konkrit peran serta

masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan UUPPLH.

2.8.2 Penelitian yang dilakukan oleh Riskiyanto Bahrul Ulum (2023) dengan judul penelitian “Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang *Quarry* Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Gerakan Sosial Perlawanan Masyarakat Sipil Desa Terhadap Hegemoni Negara: Studi Kasus Gerakan Menolak Tambang *Quarry* Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo meliputi: (1) Tindakan/Aksi kolektif dengan membentuk Gempadewa, Wadon Wadas, dan Kamudewa untuk wadah perjuangan. Selain itu juga melakukan aksi kolektif konflikual dan non konflikual. (2) Mobilisasi Sumber daya internal dan eksternal. Sumberdaya yang berhasil dimobilisasi adalah jejaring masyarakat sipil, pebentukan organisasi sepadan, dan usaha gotong royong untuk modal fisik maupun finansial gerakan. (3) Strategi organisasi dari BPRSR Yogyakarta berupa adanya tujuan yang akan dicapai, pembagian tugas dan struktur organisasi, serta tugas pokok, fungsi yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan di BPRSR Yogyakarta, strategi organisasi BPRSR Yogyakarta dilaksanakan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada ABH secara maksimal.

2.8.3 Penelitian yang dilakukan oleh M Khusnul Amal (2018) dengan judul penelitian “Gerakan Sosial Kaum Santri Melawan

Rencana Penambangan di Paseban". Kasus eksplorasi sumber daya alam tambang pasir di kawasan pesisir Paseban, termasuk salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan santri di Jember. Sejumlah elemen santri baik yang berlatar kampus, pesantren, LSM/NGOs, tercatat sebagai aktor utama yang berperan penting dalam melancarkan aksi-aksi protes (mulai dari demonstrasi sampai advokasi) terhadap kebijakan pemerintah dalam hal eksplorasi tambang. Keterlibatan mereka bersama-sama dengan elemen-elemen *civil society* progresif dalam mendesakkan perubahan sosial. Kendatipun corak kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam aksi protes itu beragam, namun reposisi mereka yang kontradiktif dalam relasinya dengan kebutuhan dominatif (negara dan pasar), dapat dikatakan cukup progresif.

Pada akhirnya aksi-aksi protes yang dilakukan kaum santri bersama kekuatan *civil society* lainnya, berhasil mendesakkan agenda perubahan. Bagaimanapun, pemerintah dan pemilik modal, tidak lagi meneruskan rencananya untuk melakukan eksplorasi tambang pasir di Paseban. Sampai pergantian Rezim kepemimpinan, rencana eksplorasi tambang tidak lagi dilanjutkan. Meskipun muncul kembali isu-isu tentang pengelolaan sumber daya alam pesisir potensial itu, namun faktanya pemerintah belum mengeluarkan izin resmi lagi. Fakta tersebut turut mengafirmasi bahwa kaum santri tetap menjadi pilar *civil*

sicoety yang berperan penting dalam menentukan agenda perubahan dan demokratisasi.

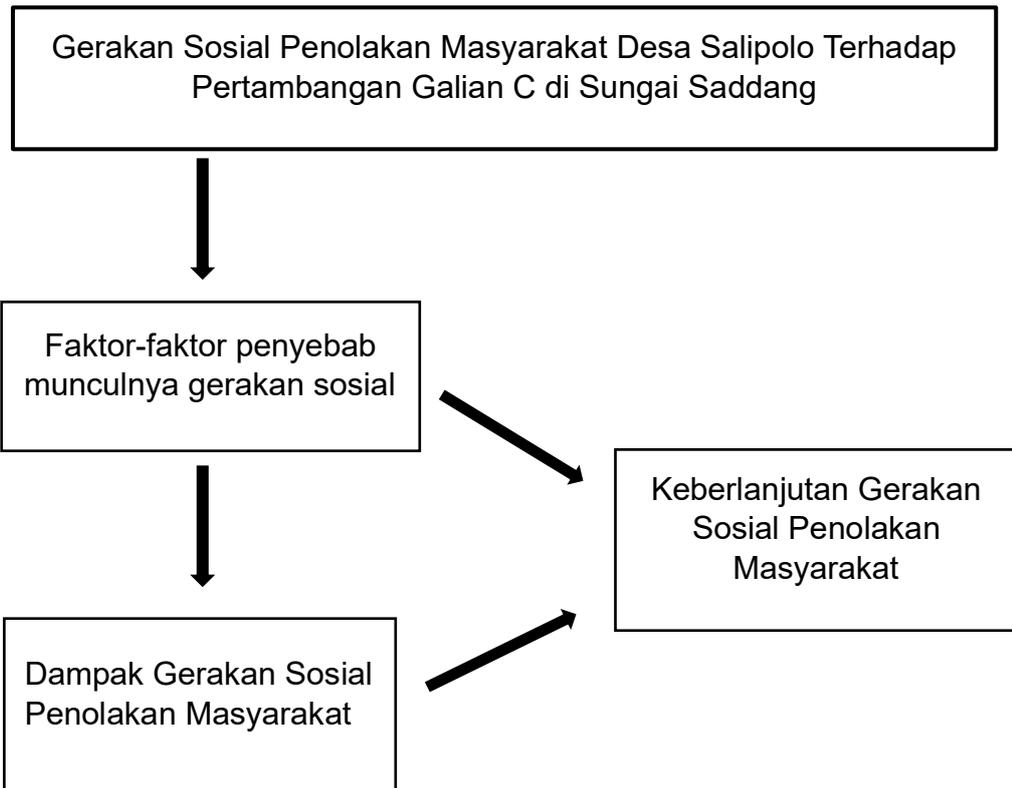
2.8.4 Penelitian ini dilakukan oleh Nursalim dan Slamet Riyono (2022) dengan judul “Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit di Desa Wadas”. Perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan batu andesit untuk Bendungan Bener sudah berlangsung lama dari sejak dilakukannya sosialisasi penetapan lokasi hingga pengukuran lahan. Perlawanan perempuan desa diwujudkan dengan membentuk perkumoulan gerakan menolak penambangan batu andesit dengan nama Wadon Desa dan tergabung dalam Gempa Dewa, membuat lagu atau Mars Gempa Dewa, memasang spanduk penolakan, memandatangan Kantor PTUN Semarang, dan melakukan doa bersama (*istigosah*) di masjid. Perlawanan perempuan terhadap kebijakan pemerintah mengenai penambangan batu andesit yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mewariskan budaya bertani kepada anak cucu, sumber daya alam Desa Wadas subur dan tak perlu ada penambangan, mempertahankan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Konflik agraria antara perempuan dengan para pemerintah dipicu oleh usaha memperjuangkan dua kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak. Pada puncak konflik tersebut terdapat tindakan represif berupa paksaan, penangkapan dan pemukulan terhadap warga

desa oleh aparat keamanan terutama oleh aparat gabungan (polisi dan TNI).

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan penelitian terkait gerakan penolakan yang dilakukan masyarakat desa Salipolo dalam menolak keberadaan penambangan pasir, peneliti mencoba membuat kerangka atau konsep pemikiran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian dan juga sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Adapun teori – teori yang mendukung pemikiran dari peneliti adalah gerakan sosial.

Penyusunan kerangka pemikiran ini juga bertujuan untuk tetap memfokuskan penelitian ke dalam objek kajian yang di teliti, sehingga pelaksanaan penelitian dan pembahasan penelitian tidak melebar dan dapat menghasilkan penelitian yang memiliki fokus dengan konsep awal yang telah di tentukan. Adapun kerangka kerangka pemikiran dirancang dalam penelitian “Gerakan Penolakan Masyarakat Desa Salipolo terhadap Penambangan Pasir Di Kabupaten Pinrang“ adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir